

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan konsep-konsep yang menjadi landasan utama baik untuk melakukan analisa penelitian maupun untuk memperluas wawasan mengenai ilmu kesejahteraan sosial, pekerja sosial, Program Kemitraan CSR PT. Antam, dan kemandirian usaha kecil dan menengah.

A. Tinjauan tentang Ilmu Kesejahteraan Sosial

1. Definisi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, masalah-masalah sosial dan program-program pelayanan sosial. Seperti halnya sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, politik, studi pembangunan, dan pekerjaan sosial, ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebab dan strategi penanggulangan masalah sosial.

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa pengertian, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan salah satu yang telah lama mengatur masalah kesejahteraan sosial sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional.

Berikut adalah definisi kesejahteraan sosial menurut PBB dalam Suharto (2010: 1) adalah:

Kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Definisi diatas menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Berikut adalah definisi kesejahteraan sosial menurut friedlander dalam Fahrudin (2014 :9) sebagai berikut:

Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and group to attain satisfyng standards of life and health, and personal and social relationships that permit them to develop their full capaties and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Di indonesia, istilah kesejahteraan sosial dirumuskan dalam UU RI No. 11 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 dalam Fahrudin (2014: 10), yang didefinisikan sebagai: “Kondisi terpenuhinya kebutuhan mental, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi atau tata kehidupan dimana

setiap orang, setiap keluarga, setiap golongan atau masyarakat, selalu dapat merasakan adanya keselamatan lahir batin, maupun memenuhi kebutuhan hidupnya (baik material maupun spritual) serta menjalankan peran sosialnya dengan baik.

Disiplin ilmu kesejahteraan sosial mengarahkan bidang cakupannya kearah yang lebih luas. Midgley dalam Adi (2005: 15) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai: *“A state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized”*.

Definisi di atas mengatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Dari penjelasan tersebut maka pengertian kesejahteraan sosial mengandung pokok-pokok pikiran bahwa konsep kesejahteraan sosial merujuk pada :

- a. Kondisi statis atau keadaan sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.
- b. Kondisi dinamis yaitu suatu kegiatan atau usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi statis tersebut.
- c. Institusi, arena atau bidang berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup individu, keluarga maupun masyarakat. Selain itu, kesejahteraan sosial mampu untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh klien. Menurut Scheneiderman (1972) dalam Fahrudin (2014: 10) tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yaitu: “Pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem”. Dari ketiga tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat.

b. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan tersebut meliputi, mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, (re) sosialisasi, peningkatan kemampuan untuk menjangkau fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah.

c. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

3. Fungsi –Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan

sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1) Fungsi pencegahan

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2) Fungsi penyembuhan

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3) Fungsi Pengembangan

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi Penunjang

Kesejahteraan sosial mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

4. Nilai dan Prinsip Dasar dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial

Menurut Zastrow dalam Adi (2005: 76) bahwa ada 3 komponen yang perlu dipertimbangkan dan dielaborasi dalam mengembangkan profesi praktisi di bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Ketiga komponen dasar tersebut adalah:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*) merupakan pemahaman teoritis ataupun praktis yang terkait dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan, belajar dan seni yang melibatkan penelitian maupun praktek serta pengembangan keterampilan.
- 2) Keterampilan (*skill*) keterampilan merupakan kemampuan, keahlian atau kemahiran yang diperoleh dari praktek dan pengetahuan.
- 3) Nilai (*value*) dapat menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

Komponen kesejahteraan sosial diatas menjelaskan bahwa dalam prakteknya para praktisi pekerja sosial dalam praktek pertolongannya menggunakan ketiga komponen tersebut. Disamping nilai-nilai diatas ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam praktek pekerja sosial. Menurut Maas (1997) dalam Adi (2005: 78) prinsip-prinsip kesejahteraan sosial adalah:

- 1) Penerimaan bahwa praktisi kesejahteraan sosial harus menerima klien apa adanya, tanpa menghakimi klien tersebut.
- 2) Komunikasi, bahwa pekerja sosial harus mampu menangkap pesan atau keinginan dari klien dan mampu menggali permasalahan klien.
- 3) Individualisasi, yaitu pemahaman bahwa setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya.
- 4) Partisipasi, yaitu ikut mengajak klien untuk turut serta berperan aktif dalam menghadapi masalah yang dihadapinya.
- 5) Kerahasiaan, pekerja sosial harus mampu menjaga kerahasiaan dari masalah yang dihadapi klien,
- 6) Kesadaran diri, yaitu praktisi kesejahteraan sosial harus mampu mengendalikan diri sehingga tidak terhanyut oleh perasaan klien.

Prinsip-prinsip diatas adalah prinsip yang saling terkait satu dengan lainnya. Pembahasan prinsip kesejahteraan sosial diatas lebih erat kaitannya dengan intervensi mikro. Akan tetapi, prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan dalam intervensi makro (pada level organisasi dan komunitas).

5. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas juga disebut sebagai usaha kesejahteraan sosial (UKS). Dalam skala dan perspektif makro, UKS ini pada intinya menunjuk pada apa yang disebut dengan pembangunan kesejahteraan sosial (PKS). Menurut Suharto (2010: 4) pembangunan kesejahteraan sosial adalah:

Usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial.

Penjelasan diatas mengenai pembangunan kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup: 1) Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial. 2) Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan. 3) Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki ciri komprehensif dalam arti setiap pelayanan yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (*beneficiarie*) sebagai manusia, baik alam arti individu maupun kolektifitas, yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturnya. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial. Akan tetapi, prioritas utama PKS adalah kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan. Sasaran PKS atau yang dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain meliputi orang miskin, penyandang cacat, anak jalanan, anak yang mengalami perlakuan salah, komunitas adat terpencil, serta kelompok-kelompok lain yang mengalami masalah psikososial, disfungsi sosial dan ketunaan sosial.

B. Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial Industri

1. Definisi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang berawal dari perkembangan pemikiran dari para filantropis yang sekaligus juga merupakan relawan. Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang menekankan pada keberfungsian sosial manusia dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Penekanan pada aspek keberfungsian sosial manusia inilah yang menjadi pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi pertolongan lainnya.

Profesi pekerjaan sosial terus mengalami perkembangan termasuk pengertian dari pekerja sosial itu sendiri. Pengertian tentang profesi pekerjaan sosial dalam (<http://www.arts.unsw.edu.au/socialwork/>) dan yang terakhir adalah: *“The Social Work Profession (Adopted from the IFSW General Meeting in Montreal, Canada, July 2000) promote social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behavior and social system. Social Work intervenes at the point where people interact with the environments. Principles of human right and social justice are fundamental to social work.”*

Pekerjaan sosial dikutip dari pertemuan Federasi Pekerja Sosial Internasional di Montreal, Kanada, Juli 2000, bahwa pekerja sosial adalah mempromosikan terciptanya perubahan sosial, pemecahan masalah pada relasi manusia, serta pemberdayaan dan pembebasan manusia untuk mencapai derajat hidup yang lebih baik. Upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan teori-teori perilaku sosial dan sistem sosial. Pekerjaan sosial mengintervensi ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan hal yang fundamental bagi pekerjaan sosial. Definisi pekerjaan sosial juga telah diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan pekerjaan sosial profesional sebagai berikut:

Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial

Pengertian diatas terlihat bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (*people*) dengan lingkungannya (*environment*), dengan mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, guna meningkatkan taraf hidup (*human well-being*) masyarakat. Pekerja sosial juga diperoleh melalui pendidikan, pelatihan serta pengalaman yang diperoleh dalam praktek pertolongan atau penanganan masalah sosial. Menurut Siporin dalam Fahrudin (2014: 61) pekerja sosial adalah: “*Social work is defined as a social institutional method of helping to prevent their social problems, to restore and enhance their social functioning*”. Pekerja sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial. Siporin juga mengatakan bahwa pekerja sosial adalah suatu institusi sosial, suatu profesi pelayanan manusia, dan suatu seni praktis dan ilmiah. Dari definisi pekerjaan sosial tersebut, maka profesi pekerjaan sosial mengandung tiga unsur pokok, yaitu :

- 1) Pekerjaan sosial dinyatakan sebagai kegiatan profesional yang prakteknya berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi kemanusiaan, perubahan sosial, dan pemberdayaan.
- 2) Sasaran kegiatan pekerjaan sosial adalah individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah dalam memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial.
- 3) Tujuan kegiatannya adalah mendorong pemecahan masalah bagi individu, kelompok dan masyarakat agar dapat memperbaiki dan meningkatkan

kemampuan berfungsi sosial, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya tujuan yang diharapkan.

2. Keberfungsian Sosial

Definisi pekerjaan sosial dengan jelas mengemukakan bahwa fokus atau pusat perhatian pekerjaan sosial yaitu *social functioning* atau keberfungsian sosial. Pekerja sosial berusaha untuk memperbaiki, mempertahankan atau meningkatkan keberfungsian individu, kelompok atau masyarakat. Menurut Burtlett dalam Fahrudin (2014: 62) mendefinisikan keberfungsian sosial sebagai: “Kemampuan mengatasi (*coping*) tuntutan (*demands*) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan. Dari definisi tersebut bahwa dalam kehidupan yang normal terdapat keseimbangan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan mengatasi masalah oleh individu. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara keduanya maka akan terjadi masalah, dalam hal ini pekerja sosial membantu untuk menyeimbangkan tuntutan lingkungan dengan kemampuan mengatasi masalah oleh individu. Keberfungsian sosial menurut Siporin dalam Fahrudin (2014: 62) menyatakan bahwa:

Keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas, seperti keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Definisi keberfungsian sosial diatas mengemukakan bahwa setiap individu, keluarga, komunitas atau kelompok masyarakat dikatakan berfungsi sosial apabila mampu melaksanakan tugas atau peran masing-masing serta mampu memenuhi kebutuhan di dalam kehidupan mereka. Pekerja sosial dalam meningkatkan

keberfungsian sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut (Dubois dan Miley, 2005; Suharto, 2006ab) dalam Edi Suharto (2007:5):

- (a) Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
- (b) Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
- (c) Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan.
- (d) Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Pekerja sosial dalam praktiknya terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok maupun masyarakat. Pekerja sosial berbeda dengan pofesi lain, seperti psikolog, dokter atau psikiater. Sebagai ilustrasi, pada saat mengobati pasien seorang dokter hanya memfokuskan perhatian pada penyakit pasien saja. Saat menghadapi klien, seorang pekerja sosial tidak hanya melihat klien sebagai target perubahan, melainkan pula lingkungan atau situasi sosial dimana klien berada, termasuk di dalamnya orang-orang penting lain (*significant others*) yang mempengaruhi klien. Mandat utama pekerja sosial adalah memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkannya sesuai dengan nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional pekejaan sosial. Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna. Keberfungsian sosial merupakan konsepsi penting bagi pekerjaan sosial.

Keberfungsian sosial merupakan *resultant* dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial dan seterusnya. Sebagai contoh, kemampuan melaksanakan peranan sosial adalah kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Misalnya, status seorang ayah memiliki peranan sebagai pencari nafkah, pelindung, dan pembimbing segenap anggota keluarga. Maka seorang ayah dikatakan berfungsi sosial apabila mampu menjalankan peranan tersebut. Sebaliknya bila seorang ayah, yang karena sesuatu sebab (umpamanya karena sakit, cacat, atau dipenjara) tidak mampu menjalankan perannya, maka dapat dikatakan tidak berfungsi sosial atau mengalami disfungsi sosial. Keluarga, organisasi sosial, dan masyarakat juga dapat dikatakan berfungsi sosial, bila mereka mampu menjalankan peranan-peranannya sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma lingkungan sosialnya.

3. Tujuan Pekerjaan Sosial

Peranan pekerjaan sosial sangat beragam, tergantung pada konteksnya. Secara umum pekerjaan sosial dapat berperan sebagai mediator, fasilitator atau pendamping, pembimbing, perencana, dan pemecahan masalah. Pekerjaan sosial berusaha untuk memperkuat keberfungsian orang dan meningkatkan efektifitas lembaga-lembaga dalam masyarakat yang menyediakan sumber-sumber. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dalam Fahrudin (2014: 66) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
- b. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber yang memberikan kesempatan-kesempatan.
- c. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
- d. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.
- e. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
- f. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
- g. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
- h. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Tujuan tersebutlah yang menjadi misi pekerja sosial didalam melakukan praktik pertolongan kepada individu, keluarga maupun masyarakat yang mengalami masalah. Dimana pekerja sosial berusaha untuk memelihara serta meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga dan masyarakat.

4. Metode Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam prakteknya menggunakan metode perubahan sosial yang terencana. Metode Pekerjaan Sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. Di dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Menurut Adi (2005: 141) Metode yang digunakan oleh Pekerjaan Sosial adalah sebagai berikut sebagai berikut :

a. Social Casework (terapi individu dan keluarga)

Metode perubahan sosial terencana pada individu dan keluarga pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan yang mempunyai masalah. Menurut Skidmore, Thackeray dan Farley dalam Adi (2005: 149) menggambarkan proses *casework* menjadi empat tahapan, adalah sebagai berikut:

1. Tahap penelitian, pada tahap ini klien mulai menjalani relasi dengan *caseworker*. Pada tahap ini selain mengumpulkan dan memilah data klien yang dapat dijadikan pegangan dalam proses pertolongan.
2. Tahap pengkajian, dari pengkajian yang dilakukan diharapkan akan menghasilkan berbagai macam bentuk terapi.
3. Tahap intervensi, dalam tahapan ini sebenarnya sudah diawali dengan pertemuan awal dengan klien. Hal ini karena proses penelitian sudah dapat dikatakan sebagai *treatment* ketika proses ini sudah membantu klien untuk dapat mengklarifikasi permasalahannya dan berusaha melakukan perubahan kondisi kehidupan.
4. Tahap terminasi, fase ini merupakan tahapan di mana relasi antara *caseworker* dan klien akan dihentikan.

Berdasarkan definisi di atas metode ini diperuntukkan kepada seorang individu yang dalam kehidupannya mengalami masalah sosial. Seorang pekerja sosial harus bisa menggali dan menangani masalah yang didapat individu tersebut melalui pendekatan untuk mengembangkan dan memecahkan masalah individu tersebut.

b. Social Group Work (Bimbingan Sosial Kelompok)

Metode perubahan sosial terencana pada kelompok disebut dengan metode *groupwork*. Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Menurut Skidmore, Thackeray dan Farley dalam Adi (2005: 161) menyatakan *groupwork* sebagai:

A method of working with people in groups (two or more people) for the enhancement of social functioning and for the achievement of socially desirable goals. Group work is based on the knowledge of people's needs for each other and their interdependence. Groupwork is a method of reducing and for accomplishing socially desirable purposes

Metode *groupwork* merupakan metode yang berorientasi penyembuhan yang didesain untuk memperbaiki atau menyembuhkan suatu disfungsi sosial. Tujuan dari metode *group work* dengan perspektif ini adalah membantu seseorang untuk belajar berbuat sesuatu yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah yang dihadapi.

c. Metode Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat merupakan model intervensi yang diarahkan pada upaya merubah masyarakat di tingkatan yang lebih luas. Menurut Brokensha dan Hodge dalam Adi (2005: 169) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai:

A movement design to promote better living for the whole community with the active participation, and, if possible, on the initiative of the community. It includes the whole range of development activities in the district whether these are undertaken by government or unofficial bodies. Community development must make use of the cooperative movement and must be put into effect in the closest association with local government bodies.

Definisi di atas menyatakan bahwa pengembangan masyarakat sebagai suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan, berdasarkan inisiatif masyarakat. Pengembangan masyarakat harus dilakukan melalui gerakan yang kooperatif dan harus berhubungan dengan bentuk pemerintahan lokal terdekat. Metode-metode diatas merupakan metode inti dalam pekerja sosial dan terdapat metode bantu yaitu aksi sosial, penelitian sosial dan pelayanan sosial.

5. Definisi Pekerjaan Sosial Industri

Pekerja sosial memiliki tugas utama yaitu melaksanakan pelayanan kemanusiaan baik pada setting lembaga (seperti lembaga rehabilitasi penyandang cacat, lembaga perlindungan anak, panti sosial bagi lanjut usia), maupun masyarakat (misalnya menjadi pengembang masyarakat atau yang menyelenggarakan program-program pemberdayaan komunitas lokal).

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, sasaran, bidang garapan dan intervensi profesi pekerjaan sosial juga semakin luas. Globalisasi dan industrialisasi membuka kesempatan bagi pekerjaan sosial untuk terlibat dalam bidang yang relatif baru, yakni dunia industri. Para pekerja sosial industri ini bekerja di perusahaan-perusahaan, baik negeri maupun swasta, untuk menangani kesejahteraan pegawai, kesehatan dan keselamatan kerja, relasi buruh dan majikan, atau perekrutan dan pengembangan pegawai dan yang lebih luas yaitu relasi perusahaan dengan masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Di Indonesia, dunia bisnis dan industri merupakan sektor yang masih jarang melibatkan pekerjaan sosial. Di negara-negara maju seperti AS, Inggris, Australia, dan New Zealand, pemberian pelayanan sosial dalam perusahaan telah meningkat. Di negara-negara tersebut, setting pekerjaan sosial tidak terbatas pada arena tradisional, seperti panti sosial atau lembaga-lembaga rehabilitasi sosial seperti yang telah disebutkan di atas. Di sana, para pekerja sosial telah bekerja di rumah sakit (menjadi Pekerja Sosial Medis), di sekolah (menjadi Pekerja Sosial Sekolah), atau di lembaga-lembaga peradilan (menjadi Pekerja Sosial

Koreksional). Setara dengan itu, para pekerja sosial juga banyak yang bekerja di dunia industri, yakni di perusahaan-perusahaan bisnis. Inilah yang kemudian memunculkan istilah Pekerjaan Sosial Industri (PSI).

Fungsi dan peran profesi pekerjaan sosial memiliki relevansi dalam meningkatkan kemampuan dan keberfungsian baik sebagai individu, keluarga, kelompok maupun sebagai suatu masyarakat, lebih khususnya peran pekerja sosial industri.

Pekerjaan Sosial Industri (PSI) dapat didefinisikan sebagai lapangan praktik pekerjaan sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metoda pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal antar individu dan lingkungannya, terutama lingkungan kerja. Menurut NASW (1987) dalam Suharto (2007:7) pekerja sosial industri adalah:

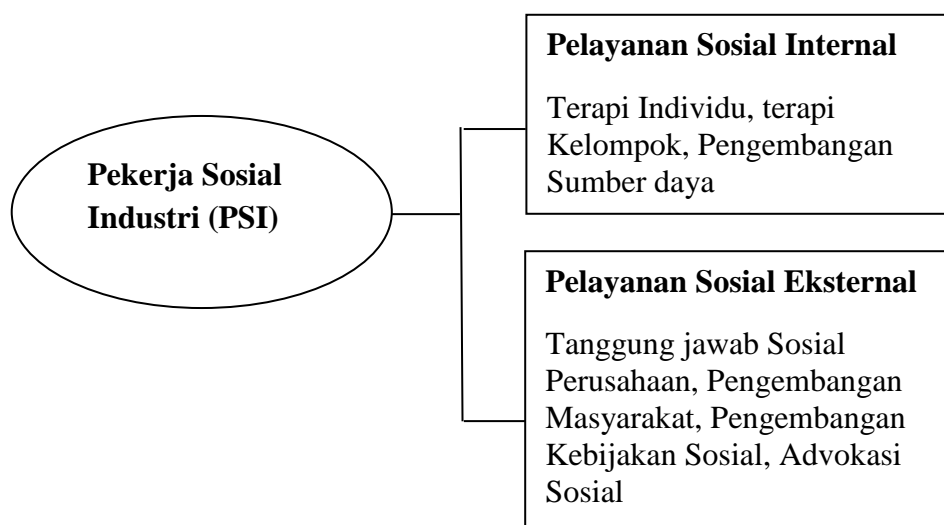
Menangani beragam kebutuhan individu dan keluarga, relasi dalam perusahaan, serta relasi yang lebih luas antara tempat kerja dan masyarakat yang dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Pekerja Sosial Industri (PSI) menggunakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pekerjaan sosial dalam pemberian pelayanan, program dan kebijakan bagi para pegawai dan keluarganya, manajemen perusahaan, serikat-serikat buruh dan bahkan masyarakat yang berada disekitar perusahaan. Sebagaimana dinyatakan Akabas dalam Suharto (2007: 7) inti PSI meliputi: “Kebijakan, perencanaan, dan pelayanan sosial pada persinggungan antara pekerjaan sosial dan dunia kerja”. Diantara berbagai kegiatan PSI antara lain adalah program bantuan bagi pegawai, promosi kesehatan, manajemen perawatan kesehatan,

tindakan *affirmative* (pembelaan), penitipan anak, perawatan lanjut usia, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan organisasi, pelatihan dan pengembangan karir, konseling bagi penganggur atau yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), tunjangan-tunjangan pegawai, keamanan dan keselamatan kerja. Menurut Suharto (2007: 8), tugas utama pekerja sosial industri adalah:

Menangani masalah kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja, relasi buruh dan majikan, serta perencanaan dan pengorganisasian program-program pengembangan masyarakat bagi komunitas yang ada disekitar perusahaan.

Definisi di atas menjelaskan bagaimana peran utama pekerja sosial industri didalam menjalankan tugasnya yaitu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, memberikan program kesehatan dan meningkatkan tingkat keselamatan kerja di perusahaan, serta membantu perusahaan dalam melaksanakan program CSR yang diberikan kepada masyarakat agar dapat berlangsung dengan baik. Jika dipetakan, maka hubungan antara PSI, CSR dan *Community Development* akan terlihat pada bagan di bawah ini:



Tabel 2.1. Hubungan antara PSI, CSR dan *Community Development*

Bagan diatas menjelaskan tujuan utama pekerja sosial industri. Konsep pekerja sosial industri lebih luas dari pada konsep Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) maupun Pengembangan Masyarakat (ComDev). Pelayanan sosial yang di lakukan Pekerja Sosial Industri bersifat internal dan eksternal, PSI melibatkan program-program bantuan bagi pegawai, seperti pelayanan konseling, terapi kelompok dan pengembangan sumber daya manusia. Secara eksternal, PSI berwujud dalam berbagai bentuk program CSR termasuk di dalamnya strategi dan program pengembangan masyarakat, pengembangan kebijakan sosial dan advokasi sosial.

6. Sejarah Pekerjaan Sosial Industri

Berdasarkan sejarah dan perkembangannya, pekerjaan sosial terlahir dalam konteks pertumbuhan masyarakat industri. Pekerja sosial industri pertama kali muncul tahun 1800-an. Para pekerja sosial mulai terlibat di berbagai perusahaan Inggris, Jerman dan AS sekitar tahun 1890, sedangkan di Prancis tahun 1920. Pada masa itu, beberapa perusahaan di sana menyewa apa yang disebut “sekretaris kesejahteraan”, ”pekerja sosial industri”, atau “sekretaris sosial”.

Pekerja sosial industri memiliki peranan penting dalam pemberian pelayanan sosial, baik yang bersifat pencegahan, penyembuhan maupun pengembangan dalam sebuah perusahaan. Pekerja sosial industri menangani masalah kesejahteraan pegawai dan masyarakat sekitar perusahaan.

Fokus profesi yang diungkapkan Freud dalam Suharto (2007: 8) bahwa: “Pekerjaan sosial sejatinya harus menyentuh dunia kerja, karena ia memberi tempat aman bagi seseorang dalam realitas dalam sebuah komunitas manusia

(*human community*)”. Pada masa kini telah banyak peningkatan yang luar biasa dalam hal perhatian dan kehadiran profesi pekerjaan sosial di dunia kerja. Semenjak tahun 1970-an, pekerjaan sosial telah menemukan bahwa tempat kerja bukanlah hanya untuk bekerja saja, tetapi merupakan suatu tempat yang penting dan unik dimana para pegawainya perlu diberi informasi mengenai pelayanan-pelayanan yang tidak selalu terkait dengan pekerjaan.

Perhatian para pekerja sosial terhadap dunia kerja, serta meningkatnya kesempatan kerja dalam bidang ini, merupakan konsekuensi dari interaksi dinamis antara faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, demografi dan hukum yang berkembang saat ini.

Pelayanan sosial di tempat kerja yang diberikan PSI berkisar pada domain fungsi-fungsi pekerjaan sosial tradisional, seperti konseling bagi para karyawan atau pegawai. Tetapi, semakin canggihnya pendidikan pekerjaan sosial dalam bidang industri, ekonomi, perencanaan, dan analisis kebijakan, asesmen keorganisasian, penelitian, pengembangan masyarakat, membuat pekerjaan sosial semakin mampu berkiprah dalam bidang industri yang bersifat non-tradisional, seperti pengembangan SDM dan organisasi, tanggung jawab sosial dan filantropis perusahaan, serta perencanaan pelayanan sosial perusahaan. Dengan demikian, seperangkat pengetahuan pekerjaan sosial yang begitu luas berpadu dengan kebutuhan kompleks tempat kerja, serta dengan meningkatnya individu yang bekerja di dunia bisnis yang memilih pekerjaan sosial sebagai “karir kedua”, telah meningkatkan peran pekerja sosial industri di dunia kerja.

Sejarah pekerja sosial industri di AS beranjak pada akhir abad ke-18 dan semakin dikenal pada awal abad ke-19 saat istilah “kapitalisme kesejahteraan” (*welfare capitalism*) semakin populer dan saat “sekretaris sosial” (*social secretaries*) dipekerjakan di perusahaan.

Perkembangan penting lainnya di bidang yang relatif baru ini juga didorong oleh munculnya Pusat Kesejahteraan Sosial Industri (*the Industrial Social Welfare Center*) yang dibentuk tahun 1969 di Sekolah Pekerjaan sosial, Columbia University di bawah arahan Hyman J. Weiner dan didanai oleh Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi, Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Amerika Serikat.

7. Tugas Pekerja Sosial Industri

Pekerja sosial industri telah memberikan kontribusi dalam memansuawikan dunia kerja. Pekerja sosial umumnya memberikan konseling di dalam maupun di luar perusahaan, pengorganisasian program-program personal, konsultasi dengan manajemen dan serikat-serikat kerja mengenai konsekuensi kebijakan perusahaan terhadap pekerja, dan bekerja dengan bagian kesehatan dan kepegawaian untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja, serta menangani kebijakan sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar. Beberapa permasalahan sosial yang umumnya ditangani pekerja sosial industri adalah dampak negatif industrialisasi yang oleh Johnson disingkat menjadi 5A dalam Suharto (2007: 16) adalah sebagai berikut:

1. Alienation: perasaan keterasingan dari diri, keluarga, dan kelompok sosial yang dapat menimbulkan apatis, marah, dan kecemasan.

2. Alcoholism atau addiction: ketergantungan terhadap alkohol, obat-obat terlarang atau rokok yang dapat menurunkan produktivitas kerja, merusak kesehatan fisik dan psikis, dan kehidupan sosial seseorang.
3. Absenteeism: kemangkiran kerja atau perilaku membolos kerja dikarenakan rendahnya motivasi pegawai, perasaan-perasaan malas, tidak berguna, tidak merasa memiliki perusahaan, atau sakit fisik dan psikis.
4. Accidents: kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh menurunnya konsentrasi pegawai atau oleh lemahnya sistem keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja.
5. Abuse: bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap anak-anak atau pasangan dalam keluarga (suami terhadap istri atau sebaliknya), seperti memukul dan menghardik secara berlebihan yang ditimbulkan oleh frustrasi, kebosanan, dan kelelahan di tempat pekerjaan.

Permasalahan sosial lainnya yang sering ditangani pekerja sosial adalah: diskriminasi di tempat kerja atau tindakan-tindakan tidak adil terhadap wanita, kaum minoritas, imigran, remaja, pensiunan, dan para penyandang cacat. Beberapa industri dan perusahaan juga sering menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat disekitarnya, seperti polusi (udara, air, tanah, suara) dan kerusakan fisik dan psikis bagi para pegawainya. Para pekerja sosial dapat membantu dunia industri untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai biaya sosial (*social cost*) yang ditimbulkan oleh perusahaan, serta memberikan program bantuan sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi.

C. Tinjauan tentang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan

1. Definisi Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal. Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek

perilaku perusahaan (*firm's behaviour*), termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci:

1. *Good corporate governance*: etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja.
2. *Good corporate responsibility*: pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat (*community development*), perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak pemangku kepentingan.

Perilaku atau cara perusahaan memperhatikan dan melibatkan *shareholder*, pekerja, pelanggan, pemasok, pemerintah, LSM, Lembaga internasional dan *stakeholder* lainnya merupakan konsep utama CSR. Kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang menyangkut aspek ekonomi, lingkungan, sosial bisa dijadikan indikator atau perangkat formal dalam mengukur kinerja CSR suatu perusahaan. Namun, CSR sering kali dimaknai sebagai komitmen dan kegiatan-kegiatan sektor swasta yang lebih dari sekedar kepatuhan terhadap hukum.

ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility* diluncurkan pada november 2010 yang bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan CSR. Beragamnya definisi mengenai CSR menuntut diupayakannya sebuah definisi yang disepakati oleh sebagian besar pihak terkait yang memuat esensi dasar, filosofi, dan tujuan dari CSR itu sendiri yang dalam pelaksanaannya dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis. ISO 26000 mengenai *Guidance on*

Social Responsibility dalam Suharto (2010:11) memberikan definisi CSR sebagai berikut :

Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan-lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Definisi diatas dapat terlihat jelas bahwa dunia usaha juga memiliki peranan dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa aspek sentral seperti lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dunia usaha bisa tetap eksis berkarya ditengah-tengah masyarakat.

Dimensi CSR yang diungkapkan John Elkington dalam The Triple Bottom Line in 21st Century Business dalam Suharto (2010: 4) pembangunan berkelanjutan mencakup 3 hal kebijakan yaitu pembangunan sosial/kesejahteraan masyarakat (*people*), keuntungan ekonomi (*profit*), dan perlindungan lingkungan (*planet*). Dan untuk melengkapinya perlu ditambahkan dimensi penerapan prosedur yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku (*procedure*).

Sehingga CSR merupakan:

Kepedulian perusahaan yang meniyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*prosedure*) yang tepat dan profesional.

Corporate social responsibilty pelaksanaanya menjadi sangat baik apabila memperhatikan hal diatas yaitu, keuntungan perusahaan, pembangunan manusia,

serta lingkungan yang dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk itu setiap perusahaan diharapkan dapat melaksanakan aktivitasnya yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa melupakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Definisi *Corporate Social Responsibility* yang dikemukakan oleh The Jakarta Consulting Group dalam Susanto (2009:11), bahwa tanggung jawab sosial perusahaan ini diarahkan baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) perusahaan. Berikut adalah definisi CSR:

Ke dalam, tanggung jawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. Ke luar, tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang.

Definisi diatas menerangkan bahwa pemegang saham telah menginfestasikan sumber operasional perusahaan. Karenanya mereka mengharapkan profitabilitas yang optimal serta pertumbuhan perusahaan sehingga kesejahteraan mereka di masa depan juga akan mengalami peningkatan. Di samping kepada pemegang saham, tanggung jawab sosial ke dalam ini juga diarahkan kepada karyawan, karena hanya dengan kerja keras, kontribusi, serta pengorbanan merekalah perusahaan dapat menjalankan berbagai aktivitas serta meraih kesuksesan. Serta perusahaan berkewajiban untuk ikut berpartisipasi menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Lapangan kerja akan semakin banyak tersedia manakala perusahaan tumbuh dan berkembang. Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi bagi masyarakat, baik yang berkaitan dengan

perusahaan maupun tidak. Perusahaan juga berkewajiban dalam memelihara kualitas lingkungan.

Robbins dan Coulter dalam Solihin (2009: 9) menggambarkan: “Perkembangan CSR dalam sebuah kontinum adopsi pelaksanaan CSR perusahaan kepada konstituen”. Kontinum tersebut juga menunjukkan bahwa jika cakupan semakin luas CSR (dilihat dari cakupan konstituen yang di layani oleh perusahaan) maka semakin besar pula CSR yang harus dilakukan. Berikut adalah tahap-tahap adopsi CSR :

Pada tahap awal, CSR lebih tertuju kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajer. Pada tahap ini pemimpin perusahaan akan mengedepankan kepentingan para pemegang saham melalui berbagai upaya untuk menggunakan sumber daya perusahaan seefisien mungkin dan melakukan maksimalitas laba. Meskipun pada tahap ini perusahaan memerhatikan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun pemimpin perusahaan memiliki pandangan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat secara luas.

Pada tahap kedua, perusahaan mulai mengembangkan CSRnya kepada para pekerja (*employee*). Pada tahap ini, manajer perusahaan tidak hanya memerhatikan maksimalisasi laba, tetapi mereka mulai memberikan perhatian yang besar kepada sumber daya manusia.

Pada tahap ketiga, perusahaan mengembangkan CSR kepada para konstituen dalam suatu lingkungan yang spesifik di mana konstituen tersebut biasanya merupakan masyarakat setempat (*local communities*) yang terkena

dampak secara langsung oleh operasional perusahaan di daerah tempat mereka tinggal.

Pada tahap ke empat, perusahaan tidak hanya mengembangkan CSR kepada masyarakat setempat, melainkan mencakup pula masyarakat luas (*broader society*). Para manajer memandang bisnis mereka sebagai bagian dari entitas publik dan mereka merasa bertanggung jawab untuk melakukan berbagai kebijakan publik.

2. Sejarah Corporate Social Responsibility

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun namanya adalah CSA, akan tetapi pelaksanaannya mendekati konsep CSR perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan, sejak tahun 2003 kementerian sosial (yang dahulunya bernama Departemen Sosial) sangat berperan aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional.

Corporate Social Responsibility pada awal perkembangannya, berbentuk pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin disekitar perusahaan. Pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara *ad-hoc*, *partial*, dan tidak melembaga. CSR pada tataran ini hanya sekedar *do good* dan *to look good*, berbuat baik agar terlihat baik. Menurut Suharto (2010: 16) bahwa: “Perusahaan yang melakukan hal tersebut termasuk dalam kategori perusahaan impresif, yang

lebih mementingkan tebar pesona (promosi) ketimbang tebar karya (pemberdayaan)”.

Perusahaan dalam melakukan aktifitas CSR pada saat ini sudah banyak yang meninggalkan pendekatan karitatif, karena tidak mampu meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal. Pendekatan *community development* kemudian semakin banyak diterapkan karena lebih mendekati konsep *empowerment* dan *sustainable development*. Prinsip-prinsip *good corporate governance*, seperti *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR.

Kegiatan CSR yang dilakukan saat ini sudah mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan *needs assessment*. Mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UKM, pemberian beasiswa, penyuluhan HIV/AIDS, penguatan kearifan lokal, pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat dan seterusnya.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas dalam Suharto (2010: 19) menyatakan bahwa: “PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial sosial dan lingkungan”. Hal ini membuat debut CSR di Indonesia semakin menguat. Sedangkan peraturan CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU. No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang kemudian dijabarkan oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 yang mengatur besaran dana CSR hingga tatacara pelaksanaannya. CSR milik BUMN

adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Penjelasan diatas merupakan awal perkembangan CSR hingga saat ini di Indonesia.

3. Tinjauan tentang Program Kemitraan

PT. ANTAM (Persero) Tbk percaya bahwa pertumbuhan dan kemajuan yang dicapai oleh Perusahaan sudah selayaknya berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar daerah operasi. Salah satu upaya untuk melakukan hal tersebut adalah dengan mengoptimalkan implementasi Program Kemitraan yang tujuannya agar mendorong kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Menurut Kartini (2009: 78) mengatakan bahwa: “Secara konseptual PKBL terdiri dari 2 kegiatan yang pada implementasinya merupakan satu kesatuan kegiatan yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan”.

Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba BUMN. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa program kemitraan adalah program pemberdayaan usaha mikro dan/atau kecil yang dilakukan BUMN dalam bentuk pemberian pinjaman dalam rangka penguatan modal usaha yang disertai dengan kegiatan pendampingan dan pelatihan. Kegiatan pendampingan diberikan dalam bentuk bantuan manajerial, bantuan produksi dan bantuan pemasaran.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. ANTAM dituntut untuk mencari keuntungan dan terus berkembang selayaknya korporasi pada umumnya. Selain itu, PT. ANTAM juga memiliki tugas untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan memajukan ekonomi bangsa ini.

PT. ANTAM melaksanakan kegiatannya dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Keuntungan yang di peroleh dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini berimbas pada dividen, pajak, dan royalti PT. ANTAM kepada negara juga terus meningkat. Tentunya, PT. ANTAM tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja. Tetapi juga berupaya untuk memajukan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar daerah operasi perusahaan. Upaya ini di lakukan melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR), termasuk Program Kemitraan di dalamnya. Kedua program ini saling bersinergi dan saling melengkapi untuk mengangkat derajat sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat serta menjamin keberlangsungan bisnis agar tetap berjalan dengan baik.

Filosofi kegiatan Program Kemitraan yang di jalankan tak lagi filantropi atau hanya sekedar memberi umpan kepada masyarakat. Kegiatan Program Kemitraan yang di jalankan harus berupa kail, agar masyarakat mampu mandiri. PT. ANTAM berharap, ketika telah meninggalkan satu daerah tambang, masyarakat sudah tak lagi bergantung kepada PT. ANTAM.

Pelaksanaan Program Kemitraan PT. ANTAM mengacu pada Peraturan Pemerintah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 05/MBU/2007. Selama periode pelaporan, Program Kemitraan PT. ANTAM terutama penggunaan dana difokuskan kepada sektor pendidikan dan pelatihan, terutama pendidikan keterampilan untuk menumbuhkan wirausahawan muda serta mengurangi pengangguran. Contohnya, PT. ANTAM menjalin kerjasama dengan Techno Motor Academy untuk mendidik pemuda lulusan SMA/SMK agar

memiliki keterampilan di bidang otomotif. Setelah lulus pendidikan, diberi modal kerja untuk mandiri atau disalurkan ke bengkel-bengkel yang menjadi mitra Techno Motor Academy.

PT. ANTAM juga menjalin kerjasama dengan International Garment Training Centre. Para pemuda yang lolos seleksi dididik untuk terampil menjahit dan pengetahuan industri garmen agar mampu bekerja di industri garmen atau memiliki keterampilan menjahit untuk usaha.

Yayasan Rumah Autis bekerja sama dengan PT. ANTAM untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kegiatan ini dilakukan PT. ANTAM untuk membantu peningkatan kesadaran penanganan anak berkebutuhan khusus, peningkatan keterampilan terapis, biaya operasional serta program kemandirian yayasan.

Program Kemitraan, selama tahun 2013 PT. ANTAM melanjutkan penyaluran dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan baik melalui penyaluran sendiri maupun sinergi dengan BUMN/Lembaga Penyalur lainnya. Selain itu, pembinaan Mitra Binaan tetap dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan perluasan pemasaran. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Program Kemitraan, PT. ANTAM mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Program Kemitraan berbasis Teknologi Informasi. PT. ANTAM juga dipercaya menjadi koordinator wilayah Sulawesi Tenggara dalam program BUMN Membangun Desa di tahun 2012.

PT. ANTAM sebagai BUMN telah ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat khususnya di sekitar wilayah operasi perusahaan. Menjalankan

Program Kemitraan (PK) merupakan salah satu upaya untuk menjalankan fungsi tersebut, Program Kemitraan dijalankan dengan basis penguatan ekonomi lokal melalui pemberian bantuan dana pinjaman bergulir untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Pemberian dana ini juga dibarengi dengan pembinaan, termasuk pelatihan manajemen usaha, pendampingan produksi, pelatihan mental dan karakteristik pengusaha dan juga promosi dan pemasaran.

Sebagai BUMN dan sudah tercatat sebagai perusahaan terbuka, PT. ANTAM terus mengedepankan pengelolaan perusahaan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Berbagai kegiatan Program Kemitraan tersebut telah memberikan dampak positif khususnya kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi PT. ANTAM. Dampak tersebut antara lain:

- a. Memberikan modal usaha dengan pengembalian angsuran yang ringan kepada pengusaha mikro dan kecil.
- b. Memberikan rangsangan kepada masyarakat untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha melalui penyaluran dana Program Kemitraan dan pembinaan kepada pengusaha kecil terutama sektor riil agar tercipta lapangan pekerjaan.
- c. Di sektor pendidikan dan pelatihan melalui kegiatan pemberian beasiswa dan pelatihan keterampilan diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesempatan pendidikan formal dan informal sehingga memiliki daya saing.

D. Tinjauan tentang Kemandirian dan UKM

1. Definisi Kemandirian

Upaya mendefinisikan dan proses perkembangannya, ada berbagai sudut pandang yang sejauh perkembangannya dalam kurun waktu sedemikian lamanya telah dikembangkan oleh para ahli. Emile Durkheim dalam Ali (2014:110) berpendapat bahwa: “Kemandirian tumbuh dan berkembang karena dua faktor yang menjadi prasyarat dari kemandirian yaitu disiplin dan memegang komitmen”. Dari pendapat tersebut mengemukakan bahwa kemandirian seseorang apabila dikaitkan dengan pelaku usaha yaitu perlunya kedisiplinan dalam hal ini keseriusan untuk menjalankan usaha serta komitmen untuk terus berusaha dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalankan.

Kemandirian menurut Barnadib dalam Fatimah (2010: 142) meliputi: “perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan, dan memiliki rasa percaya diri”. Peran perusahaan sangatlah besar dalam proses pembentukan kemandirian pelaku usaha, dimana perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menumbuhkan kemampuan bersaing dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, dengan mengambil inisiatif untuk melakukan usaha, mengambil keputusan serta bertanggung jawab atas usaha yang dilakukan. Namun hal tersebut tetap berada pada pengawasan perusahaan melalui pembinaan, pelatihan dan lain-lain yang dilakukan oleh perusahaan khususnya PT. Antam.

2. Definisi Usaha Kecil dan Mikro (UKM)

Usaha kecil memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di dalam Tambunan (2012: 1) diakui secara luas bahwa: “Di negara sedang berkembang, UKM sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang berbeda dengan usaha besar”, perbedaan tersebut yakni:

1. Jumlah pelaku usaha kecil dan menengah sangat banyak jauh melebihi usaha besar. Usaha kecil dan mikro tersebar hingga ke pelosok pedesaan. Karena itu UKM mempunyai signifikansi “lokal” yang khusus untuk ekonomi pedesaan. Dalam kalimat lain, kemajuan pembangunan ekonomi pedesaan sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UKMnya.
2. Karena UKM sangat padat karya, yang berarti mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UKM dapat dimasukkan sebagai elemen penting dari kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
3. UKM memakai teknologi-teknologi yang lebih “cocok” (jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern terhadap proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada di negara sedang berkembang, yakni sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah sedangkan modal dan

sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja berpendidikan tinggi sangat terbatas.

Usaha Kecil dan Menengah sangatlah penting, maka tidak mengherankan kenapa pemerintah di hampir semua negara sedang berkembang (termasuk Indonesia) sudah sejak lama mempunyai berbagai macam program, dengan skim-skim kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UKM. Tidak hanya itu para perusahaan juga memberikan bantuan kepada para pelaku UKM melalui *Corporate Social Responsibility* dalam Program Kemitraan.

UKM dalam Tambunan (2012: 11) adalah: “Unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi”. Di Indonesia, definisi UKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang UKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria modal maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta setahun.
2. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria usaha kecil yakni memiliki modal > 50 juta-500 juta dan memiliki omset >300 juta-2,5 miliar setahun.

3. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah modal >500 juta-10 miliar dan omset >2,5 miliar-50 miliar pertahun.

Pelaku UKM adalah orang yang melakukan atau menjalankan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Rintisan usaha ini membutuhkan pendampingan dalam menjalankan usahanya, dimana dalam Program Kemitraan, pelaku UKM yang di bina oleh PT. ANTAM selanjutnya disebut mitra binaan.

E. Tinjauan tentang Relevansi Pekerjaan Sosial dengan Pelaksanaan Program Kemitraan CSR PT. ANTAM

Era saat ini yang terus berkembang seiring dengan perkembangan jaman tentu banyak mengalami perubahan kebutuhan. Begitupun kebutuhan akan pekerja sosial yang juga terus berusaha meningkatkan dan memperluas bidang garapannya, salah satu yang muncul beberapa tahun terakhir ini adalah pekerja sosial industri. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak bisa terlepas dari individu didalam perusahaan yang merupakan sebagai karyawan perusahaan tersebut. Pekerja sosial industri bekerja pada setting industri atau perusahaan dimana pekerja sosial menangani masalah seperti *burnout*, relasi karyawan satu sama lain, relasi karyawan dengan majikan atau yang lebih luas lagi yaitu relasi perusahaan dengan masyarakat disekitar dan pemangku kepentingan lainnya atau yang lebih dikenal dengan konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Menurut Davis dan Frederick dalam Wahyudi (2011: 35) bahwa Corporate Social Responsibility adalah:

Kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di samping kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri.

Pengertian CSR tersebut mengemukakan bahwa perusahaan selain berusaha meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri, perusahaan juga dituntut untuk memperhatikan aspek di luar perusahaan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan serta terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempat perusahaan tersebut beroperasi. Dalam pengertian tersebut terdapat penekanan bahwa perusahaan harus turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu fokus dan tujuan dari pekerjaan sosial.

Tanggung jawab sosial perusahaan dan pekerja sosial didalamnya terdapat aspek atau metode pengembangan masyarakat (*community development*) yang akhir-akhir ini banyak diterapkan oleh perusahaan dengan istilah ComDev. Tujuan utama ComDev adalah bukan sekadar membantu atau memberi barang kepada para penerima bantuan. Melainkan berusaha agar para penerima memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mampu menolong dirinya sendiri. Dengan kata lain ComDev berusaha untuk memberdayakan masyarakat.

Program-program pelatihan, pemberian modal usaha, perluasan akses terhadap pelayanan sosial, dan peningkatan kemandirian, proses pemberdayaan diarahkan agar kelompok lemah tersebut memiliki kemampuan atau keberdayaan.

Menurut Suharto (2007: 110) keberdayaan di sini bukan saja dalam arti fisik dan ekonomi, melainkan pula dalam arti psikologis dan sosial seperti berikut ini:

1. Memiliki sumber pendapatan yang dapat menopang kebutuhan diri dan keluarganya.
2. Mampu mengemukakan gagasan di dalam keluarga maupun di depan umum.
3. Memiliki mobilitas yang cukup luas.
4. Berpartisipasi dalam kehidupan sosial
5. Mampu membuat keputusan dan menentukan pilihan-pilihan hidupnya.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari menentukan populasi atau kelompok sasaran, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kelompok sasaran, merancang program kegiatan dan cara-cara pelaksanaannya, pendanaannya, mengimplementasikan kegiatan, hingga memonitor dan mengevaluasi kegiatan. Penjelasan pemberdayaan dilakukan perusahaan melalui kegiatan CSR dalam program kemitraan dengan memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat. Disinilah pekerja sosial dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat dan lain-lain agar kegiatan CSR perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.